

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Untuk meredakan konflik berdarah di Timur-Tengah telah ditempuh dengan berbagai cara upaya perundingan dan konferensi hingga melahirkan puluhan resolusi, namun belum terlihat ke arah perdamaian yang diharapkan. Sejak perang Arab-Israel pertama, penyelesaian konflik telah melibatkan banyak negara-negara besar dan menjadi sebuah permasalahan Internasional sehingga mendorong PBB terjun ke dalam kancah perdamaian Timur tengah.

Walaupun secara teoritik konferensi International di Timur Tengah sulit untuk direalisasikan karena banyaknya kepentingan yang berkonflik (*conflicting interest*) daripada kepentingan bersama (*common interest*), maka semakin rumitnya perdamaian yang akan diagendakan. Keengganan masing-masing pihak yang bertikai untuk meleburkan kepentingan nasionalnya, menjadi permasalahan yang utama. Dimana kedua bangsa mengklaim wilayah Palestina sebagai negara mereka seutuhnya. Bagi Israel yang antipati terhadap Palestina, tidak menginginkan adanya negara Palestina, dan begitu pula sebaliknya. Kerasnya sikap Israel Palestina membuat jarak semakin jauh untuk menciptakan suatu pedamaian.

Indonesia dan Proses Perdamaian di Timur Tengah, menyiratkan optimisme sekaligus pengharapan yang besar terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam proses perintisan jalan damai di Timur Tengah, termasuk konflik antara Israel dan Palestina. Kekerasan yang terjadi di Palestina seperti halnya suatu perang yang tidak

pernah berakhir. Pencaplokan wilayah Palestina menjadi awal suatu konflik yang berkepanjangan di wilayah Timur-Tengah. Kecaman untuk Israel selalu digaungkan oleh pemerintah Indonesia karena hal tersebut sangat bertentangan dengan landasan kuat bangsa Indonesia yang menentang penjajahan, berdasarkan kalimat pertama Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan...”

Dengan alasan diatas maka penulis mengambil judul **”Kepentingan Indonesia Dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina di Era Presiden Susilo Bambang Yudoyono”**

B. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan upaya mencari penyelesaian komprehensif bagi kedua negara.
- b. Menjawab permasalahan dengan teori-teori yang relevan dan membuktikan hipotesa dengan data dan fakta.
- c. Untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi akademis dan menyelesaikan jenjang kesarjanaan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Timur Tengah merupakan sebuah wilayah yang rentan terhadap konflik politik. Kawasan ini memiliki arti yang strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, sehingga menyimpan potensi konflik yang sangat besar. Secara geografis, kawasan Timur tengah merupakan jalur lalu lintas darat-laut-udara yang menghubungkan tiga benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Sedangkan secara geopolitik, kawasan ini merupakan cadangan minyak terbesar dunia. Hal ini menimbulkan keinginan untuk saling berebut menguasai wilayah.

Masalah paling esensial di Timur Tengah dan yang disebut inti masalah Timur Tengah, yaitu masalah Israel-Palestina. Konflik yang melibatkan Israel-Palestina tidak terlepas dari perebutan atas wilayah Palestina. Palestina merupakan daerah kecil dan bertanah subur yang membentang antara sungai Nil dan sungai Eufrat. Inilah sesungguhnya yang diperebutkan bangsa Israel-Palestina.

Hubungan Indonesia dengan Palestina yang bermula dari hubungan dengan negara- negara di Timur Tengah yang lainnya, telah terjalin sejak abad ke 12 M yakni dari hubungan dagang dengan saudagar dari Timur- Tengah yang kemudian berkembang seiring dengan adanya perkembangan penyebaran agama Islam di kepulauan nusantara.¹ Dari hubungan dagang yang kemudian menjadi hubungan emosional yaitu aspek keagamaan (Islam) membuat Indonesia memiliki perasaan senasib dalam kepentingan Islam, yaitu perwujudan solidaritas Islam. Indonesia juga

¹ Sidik Jatmika, *Hubungan Indonesia-Timur Tengah Dekat Dihati Jauh di Ekonomi*, (Makalah Pengantar Diskusi Hubungan dagang RI Israel, Prospek dan Tantangan, Yogyakarta, 28 November 1999

memiliki kesamaan dalam hal Sumber Daya yaitu sebagai penghasil minyak bumi karenanya kestabilan politik dan keamanan di kawasan itu juga menjadi kepentingan Indonesia.²

Berawal dari kepentingan Indonesia di masa kemerdekaan, dimana Indonesia harus mempertahankan kedaulatan dengan adanya pengakuan dari negara lain untuk mencapai keabsahan suatu kedaulatan. Indonesia mendapatkan pengakuan pertama kali dari salah satu negara Timur-Tengah yaitu Palestina dan Mesir. Dari kejadian tersebut kemudian Indonesia secara langsung terlibat dalam mendukung Palestina untuk mendapat kemerdekaan. Secara khusus, realisasi dukungan Indonesia tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik, yaitu pengakuan terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina untuk memproklamkan negara Palestina pada tanggal 15 November 1988.

Sikap yang ditunjukkan Indonesia menjadi jelas bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina. Kedekatan yang dirasakan karena adanya perasaan senasib ingin mendapatkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga terjalinlah kedekatan emosional antara Indonesia dan Palestina baik dalam konteks global maupun agama. Kebijakan Indonesia di tingkat global, salah satunya adalah mendukung perjuangan bangsa yang masih dalam penjajahan. Seperti dukungan penuh pada perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan yang dimana sebagian wilayahnya dicaplok kaum zionis Israel.

² Riza Sihbudi, *Indonesia-Timur Tengah: Masalah dan Prospek*, (GEMA INSANI, Jakarta,1998),hal.33-36

Indonesia dan Palestina merupakan negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan ditematkannya Duta Besar Palestina untuk Indonesia sejak 19 September 1993. Palestina sebagai salah satu negara Timur Tengah yang mengalami konflik, telah menyita perhatian rakyat Indonesia dimana negara di Timur Tengah mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam.

Kekerasan yang terjadi di lapangan sangat menghambat pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai di meja perundingan damai. Meskipun demikian, upaya perundingan damai terus diupayakan dengan harapan dapat mencapai penyelesaian final atas konflik Israel-Palestina tersebut. Menyusul gagalnya perundingan Camp David ke-2 pada bulan Juli 1999 dan pecahnya kekerasan sejak bulan September 2002, Quartet (AS-Rusia-UE-dan PBB) pada tanggal 30 April 2003 telah mengeluarkan rencana perdamaian Palestina-Israel yang dikenal dengan "*Peace Road Map*" (Peta Jalan Perdamaian/ PJP) bagi suatu penyelesaian akhir dan menyeluruh bagi konflik Israel-Palestina.

Bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina seiring perkembangan Indonesia sempat memudar dengan adanya wacana pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel mencuat, hal ini menggambarkan adanya kelonggaran hubungan Indonesia dengan Palestina. Berawal dari tahun 1993, terjadi pembicaraan antara Menlu Indonesia (Ali Alatas) dan Menlu Israel (Shimon Peres) menjabat pada saat konferensi HAM di Wina. Kontroversi soal hubungan Jakarta Tel Aviv ditambah dengan kunjungan lima Senator Amerika Serikat ke Jakarta pada pertengahan Januari 1994 dan mendesak agar mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan

Israel. Dan pada Februari 1994, Tel Aviv mengundang empat wartawan Indonesia (dari Republika, Media Indonesia, *Bussiness weekly*, dan Eksekutif) untuk berkunjung ke Israel serta mengadakan “wawancara eksklusif” dengan Rabin .³

Pendekatan yang dilakukan Israel terhadap Indonesia diartikan dengan pemanfaatan “jalur Amerika” di tingkat politik global sebagai adikuasa global. Tidak hanya di tingkat global, Israel juga memanfaatkan “jalur Singapura untuk level ASEAN dimana Indonesia termasuk di dalamnya. Singapura memainkan peranan penting dalam mengupayakan terciptanya hubungan diplomatik Jakarta-Tel aviv, dan Singapura adalah satu-satunya negara yang menyambut gembira pertemuan Soeharto-Rabin pada saat itu.⁴ Seperti diketahui pada saat Soeharto menjabat terjadi pertemuan dengan Rabin pada Oktober 1993, Rabin mendadak singgah di Jakarta dan mengadakan pertemuan sekitar satu jam di Cendana.

Wacana itu kembali muncul pada saat Presiden Gusdur menjabat, Gus Dur yang juga pernah melawat Negeri Zionis ini di tahun 1994 kemudian berbuntut polemik. Saat itu, Gus Dur menyarankan agar pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di saat menjabat Presiden RI-4, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu juga pernah menyarankan agar Indonesia membuka hubungan dagang dengan Israel. Dari pertemuan itu menghasilkan pernyataan yang kontroversial. Gusdur yang memang dikenal sebagai politisi kontroversial, dengan jelas berbicara tentang pembukaan hubungan diplomatik antara

³ Mereka Membawa “Aspirasi Zionis” (diakses 28 november 2008) dari://swaramuslim.net/siyasah/more.php?id=5792_0_6_0_M

⁴ Riza Sihbudi,*Op. Cit.* hal.133

Indonesia dengan Israel. Kebijakan Gusdur yang kontroversial itu menggambarkan kelonggaran hubungan Indonesia dengan Palestina. Seperti diketahui Indonesia sebelumnya konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk mendapat kemerdekaan.

Kelonggaran dukungan terhadap Palestina tidak lepas dari adanya faktor ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap barat yaitu Amerika Serikat. Dukungan superpower dan ideologi Yahudi yang menyatakan bahwa bangsa yahudi adalah golongan atas seakan membenarkan segala tindakan Yahudi yang cenderung rasialis dan represif. Tidak hanya di masa Orde Baru yang diwarnai campur tangan barat, bahkan sesudahnya di masa Gus Dur dan Megawati pun masih tampak dengan adanya campur tangan IMF. Bangsa Yahudi yang mempunyai paham Zionis selalu mengedepankan kekerasan dalam cara untuk mencapai tujuan. Seperti pelepasan tawanan yang baru sebagian kecil, dan masih adanya pengejaran dan pembunuhan terhadap pemuda Palestina, menjauhkan konsep perdamaian akan terwujud.

Indonesia yang setelah masa orde baru mengalami keterpurukan, seperti halnya citra buruk yang dimiliki Indonesia pasca jajak suara di Timor Timur, PBB marah dengan tewasnya tiga petugas PBB di Atambua. Hal itu memberi citra yang buruk dengan adanya kasus HAM yang menjadi kasus Internasional yang sangat merugikan bagi Indonesia dalam menjalankan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Oleh sebab itu Indonesia sekarang ini terlibat lebih aktif lagi dalam Penyelesaian konflik Israel–Palestina sebagai bentuk pembuktian bahwa Indonesia mampu memberikan diplomasi baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri. Tampak

dalam Diskusi Terbatas yang dilakukan Deplu mengenai proses penyelesaian konflik Palestina yang diselenggarakan di Jakarta, 28 April 2008. Dalam diskusi tersebut dihadiri beberapa ahli dari Deplu dan Dubes Palestina untuk Indonesia Faris Mahdewi untuk membahas posisi Indonesia dan komitmen Total Diplomasi Indonesia terhadap perdamaian di Palestina.⁵ Indonesia akan berperan dari sisi sosial, budaya dan agama serta memperkuat peranan second track diplomacy. Indonesia diharapkan mampu mensinergikan dan memformulasi politik luar negeri yang tidak didasarkan atas ideologi tertentu serta menerapkan total diplomacy atau pendekatan multi track yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Indonesia.

Peran Indonesia dalam perdamaian Israel-Palestina nampak dalam berbagai konferensi demi terciptanya perdamaian di Timur-Tengah. Seperti salah satunya, keputusan Pemerintah RI untuk hadir dan berpartisipasi dalam *Annapolis Conference* tahun 2007 dan Konferensi Paris di tahun yang sama guna memberikan dukungan ekonomi bagi Palestina. dan atas inisiatif sendiri, Indonesia mengadakan *Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine* pada tahun 2008 sebagai program konkrit dukungan Indonesia untuk Palestina dalam bentuk pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia Palestina. Keanggotaan Indonesia di DK-PBB juga ditutup dengan peran aktif kita dalam pembahasan mengenai situasi di Palestina, khususnya Jalur Gaza.

Kecaman demi kecaman terhadap Israel terus di gaungkan oleh Indonesia

⁵ Diskusi terbatas "Tinjauan Analitis Konflik Palestina: Upaya Indonesia dalam Proses Penyelesaian Konflik Internal Palestina" Jakarta, 28 April 2008 (Diakses 2 Februari 2009); dari: http://www.deplu.go.id/?press_id=652

maupun dunia Internasional. Sikap Indonesia ditunjukkan dengan tidak mendukung rencana Israel untuk memperluas pembangunan pemukiman di Yerusalem. Pernyataan ini disampaikan pada 05 Juni 2008, dimana Indonesia mengecam tindakan Israel dan mengajak perhatian Internasional untuk peduli dengan masalah perluasan pemukiman Israel di Yerusalem timur sebagai bagian dari Palestina.⁶ Indonesia senantiasa merujuk dan mendukung keputusan yang dihasilkan PBB, khususnya Resolusi DK-PBB No-242 (1967) dan Resolusi DK-PBB No.338 (1937), yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendirikan negara diatas tanah airnya sendiri dengan al-Quds as-Syarif (Yerusalem timur) sebagai ibukotanya, dibawah prinsip "*land for peace*".

Pada Tahun 2008, Indonesia semakin aktif lagi dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina. Seperti yang diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, "Kita berada dalam posisi terbaik untuk memberikan kontribusi terhadap perdamaian global dan keamanan serta mengatasi kemiskinan," kata Yudhoyono dalam debat umum di KTT ke-11 OKI di Dakar, Senegal, Jumat 14 Maret 2008 siang waktu setempat.⁷ Seperti diketahui Indonesia telah mampu melalui dua kali pemilu dan diartikan mampu melalui masa transisi menjadi pemerintahan dengan demokrasi terbuka. Pemerintah RI, juga menyeru dunia internasional untuk membantu Palestina.

⁶ Pernyataan Indonesia atas Rencana Israel memperluas pembangunan di Yerusalem timur(diakses 28 november 2008)dari: http://www.deplu.go.id/?press_id=684

⁷ Presiden Serukan OKI Berperan Aktif,2008 (diakses 20 September 2008);dari: <http://www.kompas.com/read/xml/2008/03/14/21141377/presiden.serukan.oki.berperan.aktif>

C. Perumusan Masalah

Mengapa Indonesia terlibat lebih aktif dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono?

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Politik Luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai di luar batas wilayahnya, dan hal itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijakan suatu bangsa. Para aktor pengambil keputusan luar negeri suatu bangsa akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap formulasi kebijakan politiknya.

Teori proses pembuatan kebijakan luar negeri (The Decision Making Process) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil).⁸

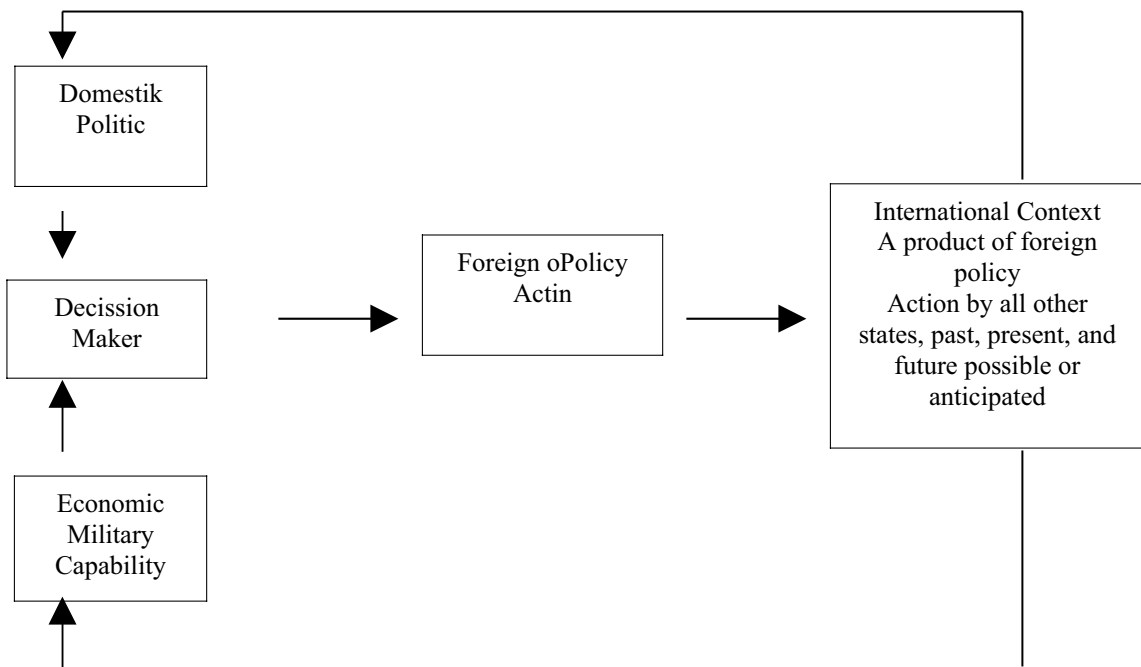
Teori Pembuatan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi beberapa faktor determinan. Pertama, kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dan sistem itu.⁹

⁸ Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda AS*, BIGRAF, Yogyakarta, 2000, hal.152

⁹ William D. Coplin, *Introduction to International Politics, A Theoretical Overview* (terjemahan

Teori proses pembuatan keputusan luar negeri dari Wiliam D.Coplin akan digunakan oleh penulis untuk mengkaji kepentingan Indonesia terhadap kawasan Timur-Tengah untuk penyelesaian damai Israel-Palestina di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono. untuk lebih jelasnya mengenai teori ini dapat dikaji dengan menggunakan diagram teori Proses pembuatan Kebijakan Luar Negeri Wiliam D. Coplin berikut ini:

Gambar 1.1
Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri oleh Wiliam D.Coplin



Sumber : Teori Pem buatan Kebijakan Luar Negeri yang diungkapkan Willam D. Coplin *Intruduction to International politics: A Theoretical Overview* (terjemahan M.Marbun), CV.Sinar Baru Bandung 1992, hal 30

Diagram tersebut menjelaskan bahwa sebuah keputusan luar negeri bisa dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri (politik, ekonomi, dan militer) dan lingkungan

M.Marubun),CV.Sinar Baru, Bandung,1992,hal:30

Internasional. Para pembuat keputusan bertindak dalam lingkungan menyeluruh yang mereka ketahui yang mencakup sistem politik nasional mereka maupun sistem internasional secara keseluruhan .

Kondisi Politik Dalam Negeri

Situasi politik domestik merupakan keadaan politik dalam negeri suatu negara yang meliputi: budaya dan tingkah laku politik, sistem pemerintahan, struktur masyarakat.

Keterlibatan Indonesia dalam perdamaian Timur-Tengah, khususnya Israel-Palestina bukanlah hal yang baru. Kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina tidak lepas dari masyarakat muslim Indonesia sebagai kelompok kepentingan. Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar, secara otomatis Politik Luar Negeri Indonesia akan mempertimbangkan aspek Palestina dan kepentingan warga negara Islam.

Berawal dari Pemilihan Presiden dimana SBY didukung oleh beberapa partai, seperti salah satunya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang secara tertulis mengikat kontrak dengan Presiden bahwa memiliki keharusan mendukung langkah perjuangan Palestina, disamping beberapa partai lain seperti PBB, PAN, PPP dll.¹⁰ Dengan latar belakang partai yang berbasis massa Islam, menguatkan komitmen SBY untuk lebih aktif dalam kepentingan Islam baik di dalam negeri maupun tingkat global. Seperti

¹⁰ PKS Resmi Dukung SBY-Kalla (diakses pada 16 Juni 2008) dari: <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/08/tgl/26/time/181514/idnews/198085/idkanal/10>

halnya proses perdamaian Israel-Palestina, Indonesia harus lebih aktif dalam proses perdamaian baik yang dicetuskan oleh PBB maupun Quartet(AS-Rusia-UE-dan PBB).

Disamping itu pula, Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang penduduknya mayoritas Islam, hal ini mempunyai kesamaan pandangan dalam agama dengan Palestina yaitu Islam. Berdasarkan hal tersebut maka konflik yang terjadi di Palestina mendorong Indonesia untuk mengambil inisiatif untuk berperan lebih aktif dalam kancah perdamaian di Palestina. Berdasarkan kedekatan emosional karena sama-sama Islam, maka Indonesia akan selalu mengusung paham solidaritas muslim yang damai.

Kemampuan Ekonomi dan Militer

Kemampuan ekonomi dan militer domestik merupakan keadaan dan perkembangan perekonomian dalam negeri dan kekuatan militer yang terdapat dalam suatu negara, meliputi sistem pertahanan-keamanan pembangunan ekonomi masyarakat, letak geografis suatu negara untuk kepentingan dan identitas sosial.

Kepentingan Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel –Palestina, dimana Palestina merupakan kawasan Timur-Tengah yang memiliki potensi ekonomi berupa 60% cadangan minyak dunia, dan 30% cadangan gas dunia. Beragam potensi yang dimiliki Arab sebagai pasar ekspor produk non migas (Bahan kimia, produk bangunan), sebagai tempat tujuan pengiriman tenaga kerja maupun pasar produk industri pariwisata.¹¹

11 Potensi Hubungan Indonesia Dengan Timur-Tengah(diakses pada 6 Juli 2009)dari:

Banyak TKI Indonesia yang bekerja di kawasan Timur-Tengah, khususnya di negara Arab. Didalam salah satu program kebijakan Pengembangan Hubungan Luar negeri, salah satu program yang dirumuskan adalah kebijakan komprehensif mengenai TKI di luar negeri.¹² Diplomasi dengan negara tujuan tenaga kerja khususnya Timur-Tengah menjadi salah satu kepentingan Indonesia di Timur-Tengah. Semakin damai negara tujuan pengiriman TKI tentu saja akan berdampak baik dengan berkurangnya perlakuan buruk TKI di luar negeri. Disamping itu pula akan meningkatkan *remittances* atau pengiriman uang dari TKI di luar negeri.

Dengan dua kepentingan tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam semakin bersemangat untuk ikut serta dalam pencapaian perdamaian di Timur-Tengah, khususnya Israel dan Palestina. Meningkatkan hubungan dalam bidang ekonomi nampaknya harus bisa dimanfaatkan Indonesia dengan sebaik mungkin. Jika hubungan ekonomi dengan negara- negara lainya seperti Amerika, Jepang , Australia, dan Singapura sudah begitu baik, nampaknya sudah waktunya bagi Indonesia untuk memberi perhatian lebih intensive ke wilayah Timur Tengah untuk dijadikan mitra bisnis.

Salah satu upaya pencapaian kepentingan nasional di dunia Internasional dilaksanakan melalui diplomasi yang diterjemahkan sebagai politik luar negeri. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia agar semakin aktif dalam mengamankan

<http://web.dev.depkominfo.go.id/blog/2008/02/27/potensi-hubungan-ekonomi-indonesia-timur-tengah/>

12 Rekomendasi Untuk Presiden, Curah Gagas Masyarakat Kampus Indonesia(diakses 20 Mei 2009) dari: www.ugm.ac.id/downloads/rekomendasi-untuk-presiden.pdf

kepentingan-kepentingan nasional Indonesia merupakan tuntutan guna menjawab berbagai masalah dan tantangan di dalam negeri. Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis, memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia dan posisi strategis kepulauan Indonesia dapat dijadikan modal yang kuat bagi Indonesia untuk lebih percaya diri dan berperan aktif di dunia Internasional.

Konteks Internasional

Konteks Internasional adalah lingkungan Internasional dimana negara itu berada dalam hubungannya dengan negara lain. Konteks internasional diartikan sebagai produk keputusan dan tindakan militer luar negeri pada masa lampau, sekarang dan yang akan datang yang dapat diantisipasi.

Faktor terakhir yang juga mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia di Timur-tengah, tidak lain karena dorongan isu konflik Israel-palestina yang memang telah lama menjadi inti persoalan Timur Tengah yang hingga kini belum tercapai perdamaian final bagi kedua pihak yang bertikai. Kegagalan konsep perdamaian yang pernah digelontorkan oleh Quartet (AS-Rusia-UE dan PBB) seperti perjanjian Oslo, Madrid, Peace Road Map dan Joint declaration, kenyataannya jauh dari konsep damai. Pelaksanaan administrasi yang tidak berjalan lancar, pelepasan tawanan yang baru sebagian kecil, dan masih adanya pengejaran dan pembunuhan terhadap pemuda Palestina menjadi fakta kegagalan proses perdamaian yang digelontorkan PBB dan Quartet (AS-Rusia-UE dan PBB). Ditambah dengan agresi Israel ke Palestina di tahun 2008 yang mengharuskan Indonesia terlibat lebih aktif

lagi untuk mendukung Palestina, baik berupa dukungan materiin ataupun in material.

Bagi Indonesia untuk dapat berhubungan baik dengan negara yang terlibat konflik dengan mengusung prinsip Politik Luar negeri Bebas-Aktif, diperlukan adanya perdamaian menyeluruh di Timur- Tengah. Berpijak dari tokoh sejarah Indonesia yang kental Internasionalismenya, Bung Hatta, yang pada saat itu beliau mampu menempatkan Indonesia dalam percaturan yang sangat kompleks. Semua observasi dan analisa Bung Hatta dibuat secara dingin, tajam, rasional. Selain menjadi Bapak Diplomasi Bebas-Aktif Indonesia Bung Hatta adalah contoh terbaik dimana nasionalisme dan Internasionalisme berpadu dengan subur dalam diri seorang pemimpin.¹³

Bercermin dari itu SBY mempunyai naluri internasionalisme yang sama dengan Bung Hatta.¹⁴ Visi kampanye SBY yang untuk menjadikan Indonesia “lebih aman, lebih adil, lebih makmur, lebih demokratis” memerlukan bukan saja sumber – sumber nasional namun juga internasional. Maka dari itu bentuk diplomasi Indonesia di era SBY untuk masalah konflik Palestina berpijak dari rasa internasionalisme yang tinggi, dengan sepenuhnya mendukung palestina sebagai wujud perdamaian Islam yang harus dijunjung tinggi dalam perwujudan solidaritas muslim yang damai.

Selesainya kasus HAM di Timor- Timor sebagai peninggalan pemerintah sebelumnya juga mampu memberi citra baru bagi Indonesia. Hal ini digambarkan dengan dukungan Timor Leste terhadap Indonesia dengan pengusulan Indonesia

¹³ *Harus bisa! Seni memimpin ala SBY, catatan harian Dr. Dino Patty Djalal.* Red and White Publishing ,Jakarta,2008,hal:30

¹⁴ *Ibid.*hal:31

sebagai anggota tetap DK-PBB. Dengan posisi Indonesia sekarang ini sebagai anggota Tidak Tetap DK-PBB mampu membuktikan kepada dunia Internasional, bahwa Indonesia mampu menjalankan demokrasi, modernitas dan Islam secara seimbang.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan sebagai negara dengan demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat . Patut disebut dengan negara yang mampu menyeimbangkan “*three in one*” Islam, Demokrasi, dan modernitas dalam kebijakan luar negerinya. Di Timur Tengah sekalipun jarang ditemukan adanya keseimbangan seperti di Indonesia, padahal disana menjadi pusat agama Islam. Pengusulan Indonesia sebagai anggota tetap DK-PBB menjadi bentuk kepentingan Indonesia di dunia global, walaupun baru Australia dan Timor Leste yang baru mendukung.

Proses perdamaian Palestina dan Israel menjadi hal yang baik untuk Indonesia, perwujudan solidaritas Islam yang menjadi komitmen Indonesia akan tercapai. Pembukaan hubungan dengan Israel, memang bukan suatu hal yang mustahil. Tetapi hendaknya harus mempertimbangkan kepentingan dari Palestina yang mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Syarat yang harus dipertimbangkan adalah menghentikan penjajahan dan penindasan terhadap warga Palestina, dan Israel harus bersedia menaati semua resolusi PBB yang berkaitan dengan masalah konflik Timur Tengah, serta pembebasan al Quds dan Al Aqsha.

E. Hipotesa

1. Keterlibatan Indonesia yang aktif dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina merupakan wujud kedekatan emosional karena sama-sama beragama Islam dan berpedoman pada pembukaan UUD '45, dan lewat PKS sebagai salah satu kelompok kepentingan menuntut untuk mendukung perjuangan Palestina.
2. Kepentingan Indonesia untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina merupakan rangkaian kebijakan untuk melaksanakan kepentingan nasionalnya yaitu kemakmuran ekonomi dengan peningkatan ekspor non migas dan pengiriman Tenaga kerja di kawasan Timur-tengah.
3. Keterlibatan aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik Isarel-Palestina merupakan kerangka kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia untuk mendapat dukungan negara Islam dalam peningkatan citra Indonesia untuk menjadi anggota tetap DK-PBB sebagai upaya menciptakan perdamaian dunia.

G. Jangkauan Penulisan

Pada Judul ini Penulis meneliti dari awal hingga berakhirnya kepresidenan Susilo Bambang Yudoyono yaitu pada tahun 2004 - 2009.

H. Metodologi Penulisan

Karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan dan menganalisa permasalahan berdasarkan data-data informasi yang dikumpulkan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara mencari data yang bersumber dari studi

literatur, artikel-artikel, website yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Keterlibatan Indonesia dalam konflik Israel-Palestina, yang membahas tentang Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia yaitu Bebas dan Aktif, dan tentang upaya pemerintah Indonesia dalam konflik Israel-Palestina dari tahun ke tahun mulai dari sebelum reformasi, masa pemerintahan Habibi, Abdurahman Wahid, Megawati

Bab III : Total Diplomasi di Era Susilo Bambang Yudoyono dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, dan menerangkan program-program Capacity Building dari pemerintah Indonesia.

Bab IV : Kepentingan Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel- Palestina pada era SBY sebagai wujud perasaan senasib membela Islam, dan adanya kebijakan untuk meningkatkan ekspor non migas dan pengiriman TKI, serta untuk mendapat dukungan negara Islam dalam pengusulan Indonesia menjadi anggota tetap DK-PBB.

Bab V : Kesimpulan